



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019 dengan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas Sekretariat Wakil Presiden yang berisi rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, serta realisasi kinerja dan anggaran pada tahun 2019.

Laporan Kinerja ini adalah pelaporan tahun terakhir dari Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015-2019 yang menyajikan target, realisasi, dan capaian kinerja atas dua sasaran strategis Sekretariat Wakil Presiden, yaitu 1.) Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas Wakil Presiden; dan 2.) Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden. Laporan Kinerja ini juga menggambarkan capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Wakil Presiden.

Sepanjang tahun 2019, Sekretariat Wakil Presiden telah melayani Wakil Presiden periode 2014 – 2019, H. M. Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024, K. H. Ma'ruf Amin. Dengan kemampuan bersinergi, menjaga integritas, bersikap adaptif dan profesional, seluruh jajaran Sekretariat Wakil Presiden mampu melayani kedua Wakil Presiden dengan baik serta mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditentukan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran dan kerja keras seluruh jajaran Sekretariat Wakil Presiden selama tahun 2019. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi dan pendorong bagi segenap pimpinan serta staf di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden untuk mencapai kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2020

Kepala Sekretariat Wakil Presiden,



Mohamad Oemar

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019 menyajikan informasi capaian kinerja sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan indikator kinerja lainnya berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015-2019.

Hasil capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan secara umum telah sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu 100%. Total pagu anggaran untuk melaksanakan sasaran tersebut adalah sebesar Rp Rp 266.372.615.000,00 dengan realisasi Rp 225.795.92,00 (84,77%). Capaian kinerja sasaran dan realisasi anggaran tersebut menunjukkan adanya efisiensi serta optimalisasi penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis.

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisisurusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negaradalam mendukung pelaksanaan tugas Wakil Presiden (IKU1). Capaian kerjanya adalah 100% (369 laporan) dan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 49.077.015.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 45.161.761.755.000,00 (92,02%). Seluruh ke deputian substansi (Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman; Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan; dan Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintahan) bertanggungjawab dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran Strategis 2

Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaandan keprotokolan yangberkualitas kepada Wakil Presiden. Sasaran strategis 2 terdiri dari dua Indikator Kinerja Utama dan empat Indikator Kinerja. Capaian kerjanya adalah 100% dan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 217.295.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 180.634.200.772 (83,13%). Yang bertanggungjawab dalam mencapai sasaran strategis 2 adalah Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan.

Selain pencapaian kinerja tersebut, laporan ini juga menyampaikan perbandingan capaian indikator kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, akuntabilitas keuangan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta pemanfaatan informasi kinerja.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I – Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Sumber Daya Manusia	4
1.5. Aspek Strategis.....	5
1.6. Permasalahan Utama	8
1.7. Sistematika Penulisan Laporan	8
Bab II – Perencanaan Kinerja	9
2.1. Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015-2019	9
2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019.....	12
Bab III – Akuntabilitas Kinerja	15
3.1. Capaian Kinerja Sasaran	15
3.2. Analisis Capaian Kinerja	22
3.3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja.....	51
3.4. Akuntabilitas Keuangan	55
3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	58
3.6. Pemanfaatan Informasi Kinerja	59
3.7. Capaian Kinerja Lainnya	59
3.8. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Tahun Sebelumnya	60
Bab IV – Penutup	61
4.1. Simpulan.....	61
4.2. Upaya ke Depan	62
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. – Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan.....	10
Tabel 2.2. – Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	11
Tabel 2.3. – Perjanjian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019	13
Tabel 3.1. – Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Sekretariat Wakil Presiden	15
Tabel 3.2. – Penanggung Jawab Masing-masing Indikator Kinerja	18
Tabel 3.3. – Tabel Nilai Skala Likert yang digunakan pada Kuesioner	19
Tabel 3.4. – Nilai Persepsi, Interval IKP, Interval Konversi IKP, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan.....	20
Tabel 3.5 – Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019	20
Tabel 3.6. – Kegiatan Dukungan Layanan Kerumahtanggaan Wakil Presiden Tahun 2019	29
Tabel 3.7. – Nilai Rata-rata Tiap Pernyataan Layanan Kerumahtanggaan	30
Tabel 3.8. – Kegiatan Dukungan Layanan Keprotokolan kepada Wakil Presiden Tahun 2019	32
Tabel 3.9. – Layanan Keprotokolan kepada Wakil Presiden Tahun 2019	32
Tabel 3.10. – Rekapitulasi Notulen Wakil Presiden Tahun 2019	42
Tabel 3.11. – Nilai Rata-rata Tiap Pernyataan Layanan Keprotokolan	43
Tabel 3.12.– Kegiatan Pers, Media, dan Pelayanan Informasi serta Dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019.....	45
Tabel 3.13. – Pelayanan Administrasi Umum di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden 2019.....	47
Tabel 3.14. – Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2019	51
Tabel 3.15. – Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018 dan 2019 ...	52
Tabel 3.16. – Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015 s.d. 2019	53
Tabel 3.17 – Pagu Anggaran Kegiatan IKU dan IK Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019	55
Tabel 3.18 – Pagu Anggaran Kegiatan IKU Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019	56
Tabel 3.19 – Realisasi Anggaran per Program Tahun 2019	56
Tabel 3.20 – Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Komposisi Aparatur Sekretariat Wakil Presiden	4
Gambar 3.1	Rapat Pengembangan Pariwisata 13 Februari 2019.....	24
Gambar 3.2	Rapat Terbatas Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i>	25
Gambar 3.3	Rapat Koordinasi Penanganan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah	26
Gambar 3.4	Rangkaian Kegiatan <i>Dialogue on the Role of Women in Building and Sustaining Peace</i>	27
Gambar 3.5	Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.....	27
Gambar 3.6	Kunjungan Perdana Menteri Republik Djibouti.....	33
Gambar 3.7	Kunjungan Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok.....	34
Gambar 3.8	Konferensi Tingkat Tinggi Belt and Road Forum II.....	36
Gambar 3.9	Penandatanganan Prasasti di Pondok Pesantren Darud Da'wah wal Irsyad.....	38
Gambar 3.10	Pembukaan Pagelaran Festival Budaya Santri Nusantara 2019	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Salah satu asas penyelenggaraan negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan tersebut menjelaskan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015-2019, Perjanjian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019, dan untuk regulasinya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengatur pelaksanaan, menyempurnakan, dan meningkatkan fungsi sistem AKIP menjadi salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Sekretariat Wakil Presiden selama tahun 2019, media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja instansi dalam satu tahun anggaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan, dan umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang.

1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, menjelaskan bahwa:

Kedudukan Sekretariat Wakil Presiden

Sekretariat Wakil Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara, dipimpin oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden, dan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat Wakil Presiden dapat menerima penugasan langsung dari Wakil Presiden.

Tugas Sekretariat Wakil Presiden

Sekretariat Wakil Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi Sekretariat Wakil Presiden

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Sekretariat Wakil Presiden menyelenggarakan fungsi:

- a. Dukungan data, informasi, dan analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman; pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan; serta pemerintahan kepada Wakil Presiden;
- b. Pelayanan kerumahtanggaan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden;
- c. Urusan keprotokolan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan acara kenegaraan dan acara resmi yang dipimpin atau dihadiri Wakil Presiden, dan acara lainnya yang dihadiri Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan acara perjalanan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. Pengoordinasian kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden;

- g. Pelaksanaan hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara, kementerian negara, dan lembaga pemerintah non-kementerian lainnya, serta instansi terkait yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- h. Perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden;
- i. Pengelolaan dana operasional Wakil Presiden;
- j. Koordinasi dengan satuan-satuan organisasi lain di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dalam rangka pemberian teknis dan administrasi, serta analisis bagi pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden;
- k. Pemberian petunjuk-petunjuk teknis di bidang kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada para Ajudan Wakil Presiden dan Ajudan Istri/Suami Wakil Presiden;
- l. Pengoordinasian Tim Dokter Kepresidenan dalam rangka pemberian layanan kesehatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden;
- m. Pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Presiden dan Menteri Sekretaris Negara.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Sekretariat Wakil Presiden dibantu oleh:

a. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi, serta analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.

b. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi, serta analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.

c. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi, serta analisis kebijakan di bidang pemerintahan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.

d. **Deputi Bidang Administrasi**

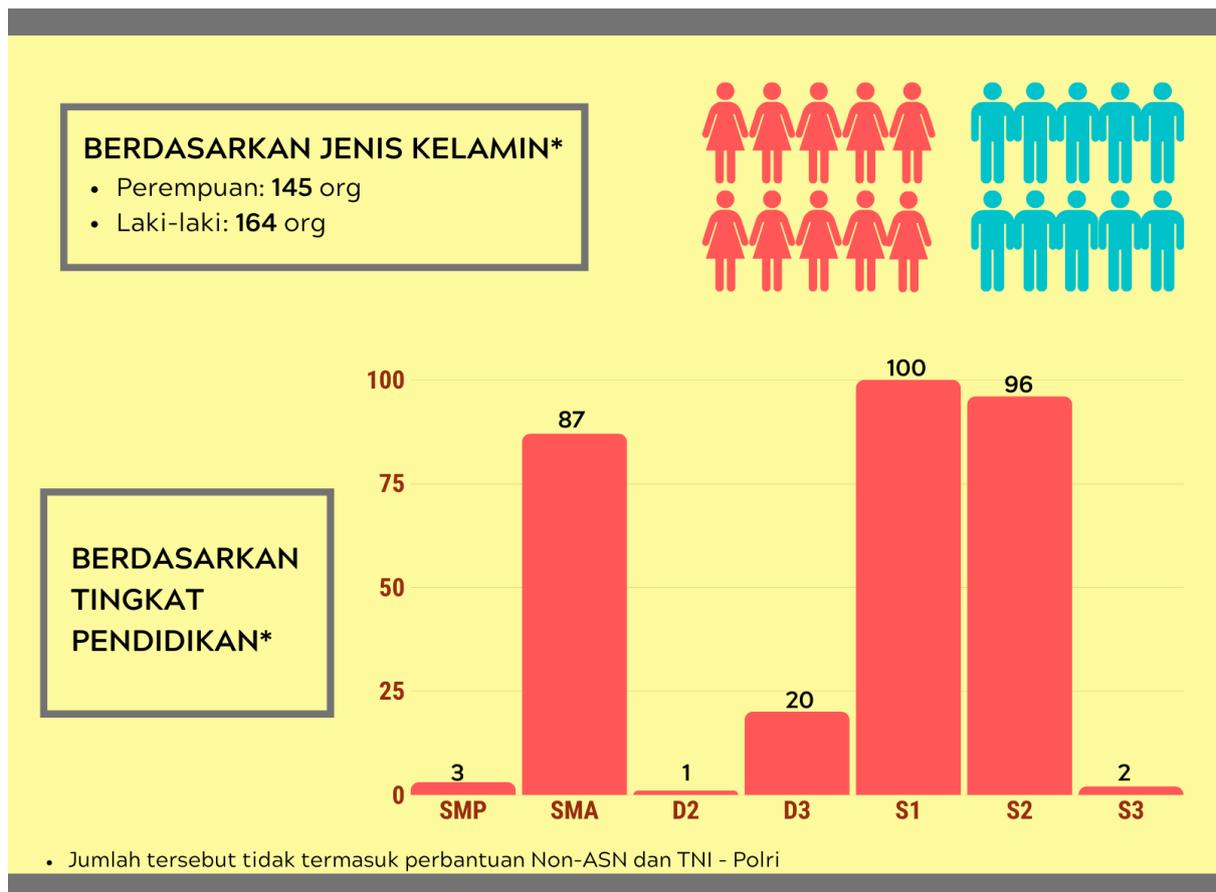
Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Wakil Presiden dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden di bidang keprotokolan, kerumahtanggaan, media massa, perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan teknologi informasi, serta pelayanan administrasi umum dan kegiatan penting lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.

1.4 Sumber Daya Manusia

Hingga akhir Desember 2019, Sekretariat Wakil Presiden didukung oleh 367 orang aparatur dari berbagai bidang keahlian dan tenaga yang diperbantukan pada posisi-posisi tertentu.

Gambar 1.1. Komposisi SDM Aparatur Sekretariat Wakil Presiden

KOMPOSISI SDM APARATUR SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN	
Pegawai Setwapres	Jumlah
Eselon I	2
Eselon II	14
Eselon III	51
Eselon IV	94
Jabatan Pelaksana Gol. III	53
Jabatan Pelaksana Gol. II	79
Jabatan Fungsional Tertentu	16
Total	309
Perbantuan Non-ASN (Staf Khusus dan Asisten Staf Khusus Wakil Presiden, Tim Ahli dan Tim Ahli Wakil Presiden, Sekretaris Pribadi Wakil Presiden dan Istri Wakil Presiden)	43
Perbantuan TNI dan Polri (Ajudan dan Pengemudi VVIP)	15
Total Pegawai dan Perbantuan	367



1.5 Aspek Strategis

Secara konstitusional peran Wakil Presiden dalam pemerintahan sebagai Pembantu Presiden maupun sebagai Pengganti Presiden (jika Presiden berhalangan) sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Hal ini membuat ruang lingkup isu yang ditangani oleh Wakil Presiden pun menjadi luas dan dinamis bergantung pada penugasan yang diberikan oleh Presiden.

Wakil Presiden periode 2014-2019 mendapat tugas dari Presiden untuk menangani hal tertentu, yang secara garis besar meliputi isu dibidang reformasi birokrasi, otonomi daerah, penanggulangan bencana, penanggulangan kemiskinan, stunting, kepemudaan dan pariwisata. Dalam menjalankan tugas tersebut di atas, Wakil Presiden dibantu oleh Sekretariat Wakil Presiden yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi, serta analisis yang prima kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan.

Beberapa penugasan dari Presiden kepada Wakil Presiden selama tahun 2019 antara lain:

A. Penugasan Presiden kepada Wakil Presiden Sesuai Perpres atau Keppres (delegatif)

1. Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

TNP2K yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku

kepentingan di tingkat pusat, yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Tugas pokok TNP2K antara lain (1) menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; (2) melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga; serta (3) melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

2. Ketua Pengarah Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)

Presiden Joko Widodo membentuk KPRBN pada 18 Mei 2015 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019. Pembentukan komite tersebut untuk mengawal kesinambungan pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2025. Sesuai peran strategisnya, Wakil Presiden telah memimpin langsung rapat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh kementerian/lembaga terutama perkembangan pelaksanaan kebijakan alih fungsi jabatan struktural eselon III dan eselon IV menjadi jabatan fungsional, serta kendala pelaksanaannya di pusat dan daerah.

3. Ketua Pengarah Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menjelaskan bahwa DPOD mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi: (a) penataan daerah; (b) dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus; (c) dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan (d) penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

4. Ketua Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata

Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata, mengamanatkan Wakil Presiden selaku Ketua Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata. Pemerintah tahun 2019 fokus pada pengembangan empat destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang dan Labuan Bajo.

5. Ketua Tim Pengarah Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

6. Ketua Satuan Tugas Penanganan Korban Bencana Gempa Dan Tsunami Di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dan Wilayah Terdampak Lainnya.

Dasar hukum: Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Penanganan Korban Bencana Gempa Dan Tsunami Di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dan Wilayah Terdampak Lainnya.

7. Anggota Dewan Ketahanan Nasional

Dasar hukum: Keputusan Presiden No.101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional

8. Wakil Ketua Komite Nasional Keuangan Syariah

Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah.

B. Penugasan Presiden dalam sidang kabinet, rapat terbatas atau secara langsung (direktif). Hingga saat ini adalah penanganan sektor pariwisata.

C. Inisiatif Wakil Presiden

1. Koordinator lintas sektor penanggulangan terorisme dan deradikalisasi. Selama tahun 2019, telah diadakan beberapa kali rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden dan dihadiri oleh pimpinan Kementerian/lembaga terkait membahas kebijakan pemerintah yang terintegrasi untuk menanggulangi terorisme dan deradkalisasi.
2. Wakil Presiden menaruh perhatian besar untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, UMKM dan kepariwisataan
3. Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), merupakan upaya mendorong penerapan pemahaman Islam *Wasathiyah* (moderat) dan menjadikan Indonesia sebagai kiblat peradaban islam di dunia.
4. Percepatan Pencegahan Anak Kerdil/*Stunting* (merupakan hibah dari World Bank sampai dengan tahun 2022), percepatan penanggulangan kemiskinan (termasuk penanganan hibah Australia melalui DFAT sampai dengan tahun 2022).

1.6 Permasalahan Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015, Sekretariat Wakil Presiden mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi, serta analisis yang prima kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan pencapaian kinerja, yaitu:

- a. Tingginya dinamika kegiatan Wakil Presiden antara lain dengan adanya penugasan mendadak dari Presiden, sehingga ruang lingkup isu yang ditangani oleh Wakil Presiden menjadi luas dan dinamis.
- b. Adanya perubahan preferensi Wakil Presiden atas penyajian bahan/laporan analisis kebijakan; dan
- c. Belum seluruh unit kerja memanfaatkan atau memiliki Sistem Informasi untuk penyimpanan data dan informasi dalam proses penyusunan analisis kebijakan, sehingga hal ini mempengaruhi ketepatan waktu, konten, dan penyajian analisis kebijakan;
- d. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (misalnya SPDE Open) dalam mendukung kinerja di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Bab I – Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum Sekretariat Wakil Presiden dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Menguraikan ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran; analisis capaian kinerja masing-masing indikator kinerja; faktor pendukung keberhasilan dan permasalahan serta solusi; perbandingan capaian indikator kinerja dengan tahun sebelumnya; akuntabilitas keuangan; efisiensi penggunaan sumber daya; pemanfaatan informasi kinerja; serta tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

Bab IV – Penutup

Memaparkan simpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019 serta langkah yang akan dilakukan Sekretariat Wakil Presiden dalam rangka meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015-2019

Sekretariat Wakil Presiden menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015-2019 sebagai pedoman menjalankan tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara selama jangka waktu lima tahun.

Visi Sekretariat Wakil Presiden

Sekretariat Wakil Presiden menetapkan visi dalam rangka mengantisipasi kondisi lingkungan strategis yang penuh tantangan dan harapan di masa mendatang, serta dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Andal mengandung arti suatu kondisi dimana seluruh unsur dalam Sekretariat Wakil Presiden dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan tanpa kesalahan (*zero mistake*).

Sekretariat Wakil Presiden yang andal dalam memberikan pelayanan kepada Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi Sekretariat Wakil Presiden

Sekretariat Wakil Presiden menetapkan misi dalam rangka mewujudkan visinya, antara lain:

- a. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang optimal kepada Wakil Presiden; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Sekretariat Wakil Presiden.

Tata Nilai Sekretariat Wakil Presiden

Sekretariat Wakil Presiden merumuskan nilai-nilai sebagai ukuran yang mengandung kebenaran dan kebaikan tentang keyakinan juga perilaku organisasi yang dianut serta digunakan sebagai budaya kerja organisasi dalam pengambilan keputusan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden dengan mengacu kepada visi dan misi.

Penetapan nilai-nilai Sekretariat Wakil Presiden dalam rangka mewujudkan visi dan misi memberikan dasar sekaligus sikap juga perilaku seluruh aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari serta menyatukan hati dan pikiran seluruh aparatur.

a. profesional

memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos kerja berprestasi, serta menjunjung tinggi etika profesi;

b. transparan

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

c. akuntabel

setiap kegiatan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. prima

sebagai yang utama, sempurna atau sangat baik, memuaskan, dan juga bermakna kesanggupan untuk menyelesaikan tugas tanpa kesalahan (*zero mistake*), aman serta mampu memelihara keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dengan kerahasiaan negara;

e. integritas

mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi serta kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran;

f. efektif

setiap usaha dan tindakan yang dilakukan dapat berhasil guna;

g. efisien

mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, serta biaya.

Tujuan Sekretariat Wakil Presiden

Sekretariat Wakil Presiden merumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi.

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang dukungan kebijakan ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman; pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan; serta pemerintahan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	1. Persentase hasil dukungan teknis dan administrasi serta analisis kebijakan di bidang dukungan kebijakan ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman; pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan; serta pemerintahan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	100%
	2. Indeks pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	4,44

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretariat Wakil Presiden

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Indikator kinerja sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja lainnya Sekretariat Wakil Presiden. Sekretariat Wakil Presiden menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja melalui kajian yang menyeluruh.

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung tugas Wakil Presiden	IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden
2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	IKU2: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden
	IKU3: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden
	IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan
	IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan
	IK6: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden
	IK7: Jumlah laporan program, anggaran dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun

Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Wakil Presiden

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Wakil Presiden memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Wakil Presiden, serta dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Wakil Presiden meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dukungan teknis, administrasi, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden;
- b. meningkatkan kualitas dukungan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Sekretariat Wakil Presiden, mencakup kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan serta dukungan manajemen kepada Wakil Presiden;
- c. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur Sekretariat Wakil Presiden; dan
- d. meningkatkan kualitas kompetensi serta pembinaan aparatur.

Program Sekretariat Wakil Presiden

Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Wakil Presiden pada tahun 2019 adalah:

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Sekretariat Negara.
- b. Program penyelenggaraan pelayanan dukungan kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja menciptakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya dalam rangka menjaga kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah:

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan juga sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- e. sebagai dasar dalam penetapan sasaran strategis.

Sekretariat Wakil Presiden menyusun perjanjian kinerja tahun 2019 disusun di awal tahun 2019 dengan mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015-2019. Hasil dari pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja, ditindaklanjuti dengan merevisi Perjanjian Kinerja Tahun 2019, berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-1878/AG/2019 tanggal 1 Oktober 2019 hal Penyampaian SP SABA 999.08 dalam Rangka Pergeseran Anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Sekretariat Negara (BA 007) TA 2019.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung tugas Wakil Presiden	IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%
2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	IKU2: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	4,44
	IKU3: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	4,44
	IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya	100%

	di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	
	IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%
	IK6: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden	1 Laporan
	IK7: Jumlah laporan program, anggaran dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun	2 Dokumen
<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Sekretariat Negara 2. Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden 		

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Wakil Presiden tahun 2019 dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian kinerja Sekretariat Wakil Presiden. Capaian kinerja sasaran menginformasikan kinerja, berupa *outcome* pada tahun 2019.

Perhitungan realisasi dilakukan dengan menggunakan formula yang berbeda untuk masing-masing indikator kinerja yang diuraikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja Sekretariat Wakil Presiden

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja & Formulasi Perhitungan
<p>Sasaran Strategis 1: Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas Wakil Presiden</p>	<p>IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden</p> <p>Formulasi: $\frac{\text{jumlah hasil analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden}}{\text{jumlah hasil analisis kebijakan yang disampaikan kepada Wakil Presiden}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan:Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dokumentasi hasil kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memorandum/laporan hasil analisis/hasil kajian 2. Bahan sambutan/audiensi/rapat/kunjungan kerja Wakil Presiden 3. Memorandum penanganan informasi publik/masyarakat 4. Laporan penyerapan pandangan 5. Laporan perkembangan kegiatan 6. Buku agenda tata usaha pimpinan Kepala Sekretariat Wakil Presiden 7. Agenda/Jadwal Acara Harian Wakil Presiden <p>Penjelasan: Analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden adalah hasil analisis berupa memorandum, laporan, dan bahan sambutan/audiensi/rapat/kunjungan kerja Wakil Presiden yang disampaikan oleh seluruh Deputi substansi dan disetujui/direspon oleh Wakil Presiden baik yang terdokumentasikan secara manual dalam buku agenda tata usaha pimpinan Kepala Sekretariat Wakil Presiden maupun elektronik.</p>
<p>Sasaran Strategis 2: Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden</p>	<p>IKU2: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden</p> <p>Formulasi: Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden, dengan responden perangkat melekat dengan Wakil Presiden</p>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja & Formulasi Perhitungan
	<p>Tipe Perhitungan:Non kumulatif</p> <p>Sumber Data:Hasil survei</p> <p>Penjelasan: Jenis pelayanan kerumahtanggaan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jamuan 2. Dekorasi 3. Natura jamuan dan kebersihan 4. Perawatan linen <p>Perangkat melekat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sekretariat Wakil Presiden 2. Deputi Bidang Administrasi 3. Para pejabat/pegawai Biro Protokol 4. Sekretaris Pribadi Wakil Presiden 5. Ajudan Wakil Presiden
	<p>IKU3: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden</p> <p>Formulasi: Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden, dengan responden perangkat melekat dengan Wakil Presiden</p> <p>Tipe Perhitungan:Non kumulatif</p> <p>Sumber Data: Hasil survei</p> <p>Penjelasan: Jenis pelayanan keprotokolan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan acara harian Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden 2. Penyiapan acara kunjungan kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke daerah 3. Penyiapan acara kunjungan kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke luar negeri 4. Penyiapan dan pelaksanaan rapat/sidang yang dipimpin oleh Wakil Presiden 5. Pengelolaan naskah pidato/notulen dan penerjemahan yang terkait dengan kegiatan Wakil Presiden <p>Perangkat melekat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sekretariat Wakil Presiden 2. Para Deputi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden 3. Staf Khusus Wakil Presiden 4. Sekretaris Pribadi Wakil Presiden 5. Ajudan Wakil Presiden 6. Dokter Pribadi Wakil Presiden 7. Para pejabat/pegawai Biro Protokol 8. Tim Notulis Wakil Presiden 9. Pengemudi rangkaian 10. Pasukan Pengamanan Presiden Grup B 11. Para pejabat/pegawai pada Bidang Peliputan dan Dokumentasi 12. Para pejabat/pegawai pada Subbagian Ketertiban dan Keamanan Dalam
	<p>IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan</p> <p>Formulasi:</p>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja & Formulasi Perhitungan
	<p>jumlah kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan</p> $\frac{\text{jumlah kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan}}{\text{jumlah kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden}} \times 100\%$ <p>Tipe Perhitungan:Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Laporan dan dokumen kegiatan dokumentasi dan diseminasi informasi kegiatan Wakil Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden</p> <hr/> <p>IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan</p> <p>Formulasi:</p> $\frac{\text{jumlah kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan}}{\text{jumlah kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden}} \times 100\%$ <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Laporan dan dokumen kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden</p> <hr/> <p>IK6: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden</p> <p>Formulasi: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden</p> <p>Tipe Perhitungan:Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden</p> <hr/> <p>IK7: Jumlah laporan program, anggaran dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun</p> <p>Formulasi: Jumlah laporan program, anggaran dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun</p> <p>Tipe Perhitungan:Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Rencana Kerja Sekretariat Wakil Presiden dan Laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden</p>

Pencapaian kinerja masing-masing indikator kinerja merupakan tanggung jawab seluruh kedeputian di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja. Berikut tabel daftar penanggung jawab masing-masing indikator kinerja.

Tabel 3.2
Daftar Penanggung Jawab Masing-masing Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas Wakil Presiden	IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman 2. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan 3. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan
2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	IKU2: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	Deputi Bidang Administrasi
IKU3: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden		Deputi Bidang Administrasi	
IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan		Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan	
IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan		Deputi Bidang Administrasi	
IK6: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden		Deputi Bidang Administrasi	
IK7: Jumlah laporan program, anggaran, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden		Deputi Bidang Administrasi	

Metode Penghitungan

Untuk penghitungan IKU 2 (Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga kepada Wakil Presiden) dan IKU 3 (Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden) digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga dan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden dari perangkat melekat dengan Wakil Presiden. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga dan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden.

Seluruh kuesioner dalam survei tersebut menggunakan pernyataan tertutup dan diukur dengan menggunakan skala *Likert*. Penggunaan skala *Likert* dengan 6 (enam) skala pengukuran adalah untuk menghindari jawaban netral dan ragu-ragu dari responden. Dalam menjawab kuesioner ini, responden diminta persetujuannya berdasarkan pernyataan yang tertera pada masing-masing kuesioner, sebagai berikut.

Tabel 3.3
Tabel Nilai Skala Likert Yang digunakan pada Kuesioner

No	Pernyataan	Nilai Pertanyaan
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Tidak Setuju (TS)	2
3	Agak Tidak Setuju (ATS)	3
4	Agak Setuju (AS)	4
5	Setuju (S)	5
6	Sangat Setuju (SS)	6

Metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan penghitungan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing pertanyaan pelayanan. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan (IKP) kerumahtangga dan keprotokolan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKP yaitu antara 25 – 150, maka hasil penilaian tersebut akan dikonversikan dengan nilai dasar 25. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$\text{BobotNilaiRata – RataTertimbang} = \frac{\text{JumlahBobot}}{\text{JumlahPernyataan}}$$

$$\text{IKP} = \frac{\text{TotaldariNilaiPersepsiPernyataan}}{\text{TotalPernyataanyangTerisi}} \times \text{NilaiPenimbang}$$

$$\text{Nilai konversi IKP} = \text{IKP Pernyataan} \times 25$$

Tabel 3.4
Nilai Persepsi, Interval IKP, Interval Konversi IKP, Mutu Pelayanan,
dan Kinerja Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Nilai Interval Konversi IKP	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1,00 – 1,83	25 – 45,75	F	Sangat Tidak Baik
2	1,84 – 2,66	46 – 66,5	E	Tidak Baik
3	2,67 – 3,49	66,75 – 87,25	D	Agak Tidak Baik
4	3,50 – 4,32	87,5 – 108	C	Agak Baik
5	4,33 – 5,15	108,25 – 128,75	B	Baik
6	5,16 – 6,00	129 – 150	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan sepanjang tahun 2019, diperoleh hasil pengukuran capaian kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikato Kerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas Wakil Presiden	IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100% (369 laporan)	100%
2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolanan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	IKU2: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	4,44	5,20	100%
		IKU3: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolanan kepada Wakil Presiden	4,44	5,33	100%
		IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%	100% (3.431 kegiatan)	100%
		IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%	100% (44.189 kegiatan)	100%

		IK6: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden	1Laporan	1 Laporan	100%
		IK7: Jumlah laporan program, anggaran, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Tabel 3.3 menjelaskan bahwa berdasarkan hasil perhitungan formulasi masing-masing indikator kinerja menghasilkan capaian sebagai berikut.

- IKU1 menghasilkan 369 hasil analisis yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden (100%);
- IKU2 dengan nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan adalah 5,20 (100%), mutu pelayanan A, dan kinerja pelayanan Sangat Baik;
- IKU3 dengan nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan adalah 5,33 (100%), mutu pelayanan A, dan kinerja pelayanan Sangat Baik;
- IK4 menghasilkan 3.431 kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan (100%);
- IK5 menghasilkan 44.189 kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan (100%);
- IK6 menghasilkan satu laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden, yaitu Laporan Pengelolaan Dana Operasional dan Bantuan (DOB) Wakil Presiden Tahun 2019 (100%); dan
- IK7 menghasilkan dua dokumen laporan program, anggaran, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun, yaitu Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019 dan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018 (100%).

3.2 Analisis Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS 1:

Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas Wakil Presiden

IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 merupakan kontribusi dari kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU1 Sekretariat Wakil Presiden, yaitu hasil analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden. Yang dimaksud dengan hasil analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden adalah hasil analisis berupa memorandum, laporan, dan bahan sambutan/audiensi/rapat/kunjungan kerja Wakil Presiden yang disampaikan oleh seluruh Deputi substansi dan disetujui/direspon oleh Wakil Presiden baik yang terdokumentasikan secara manual dalam buku agenda tata usaha pimpinan Kepala Sekretariat Wakil Presiden maupun elektronik.

a) Analisis capaian kinerja *output*

Pada tahun 2019, capaian kinerja IKU ini sebesar 100%, yaitu terdapat 369 hasil analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang harus dianalisis dan seluruhnya telah selesai dianalisis dengan rincian sebagai berikut.

1. Laporan analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman sebanyak 74 hasil analisis. Beberapa kegiatannya yaitu:
 - a. Mendukung Wakil Presiden sebagai Ketua Tim Koordinasi Kepariwisata. Laporan yang dihasilkan antara lain:
 - Laporan Pengembangan Destinasi Wisata Super Prioritas Borobudur.
 - Laporan Pengembangan Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo.
 - Laporan penyerapan pandangan Pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau
2. Laporan analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan sebanyak 175 hasil analisis. Beberapa kegiatannya yaitu:
 - a. Mendukung Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan lintas kementerian serta memantau pelaksanaan dan pencapaian strategi nasional percepatan penurunan *stunting*. Laporan yang dihasilkan antara lain:
 - Laporan Kegiatan Sinkronisasi Pelaporan Semester I Hibah Percepatan *Stunting*.

- Laporan pelaksanaan kunjungan dalam rangka Misi Dukungan Implementasi Program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Implementation Support Mission*).
 - Laporan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis dalam rangka konvergensi Program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil pada beberapa wilayah prioritas di Indonesia.
 - Penyiapan bahan Rapat Terbatas terkait Optimalisasi Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita, serta Edukasi kepada Masyarakat untuk Percepatan Pencegahan *Stunting*.
- b. *Policy brief* tentang penanganan bencana di Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara barat, dan wilayah terdampak lainnya. Laporan yang dihasilkan antara lain:
- Telaahan relokasi korban terdampak bencana
 - Laporan monitoring Penetapan Lokasi Hunian Tetap (Huntap) Bencana Gempa dan Tsunami.
- c. Laporan perkembangan pembangunan infrastruktur dan kurikulum Universitas Islam Internasional Indonesia.
3. Laporan analisis kebijakan di bidang pemerintahan sebanyak 120 hasil analisis. Beberapa kegiatannya antara lain:
- a. *Policy brief* tentang penanganan konflik Papua dan persiapan menghadapi Otonomi Khusus Papua yang akan berakhir tahun 2021.
- b. Laporan kegiatan rangkaian *Peace Building Process* bagi Masyarakat Afghanistan (kegiatan Capacity Building Pemuda – Pelajar Afghanistan, kegiatan diklat bidang ESDM bagi Masyarakat Afghanistan, dan kegiatan *Women Conference* bagi Perempuan Afghanistan).
- c. Penyiapan bahan rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) tentang alih fungsi Eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional serta rekrutmen CPNS 2020.

b) Analisis capaian kinerja *outcome*

Pada tahun 2019, capaian *outcome* IKU ini sebesar 100%, yaitu terdapat 369 hasil analisis yang telah ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden sebagai bahan pengambilan keputusan.

Beberapa hasil analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden sebagai bahan pengambilan keputusan adalah:

1. Laporan analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman terkait laporan Pengembangan Destinasi Wisata Super Prioritas Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Danau Toba.

Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat koordinasi upaya pengembangan empat destinasi wisata yang diproyeksikan sebagai 'Bali Baru' demi menarik lebih banyak wisatawan domestik dan mancanegara. Hal ini berdasarkan arahan Presiden yang telah menetapkan empat super prioritas, yaitu nomor satu Danau Toba, (Candi) Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo-Pulau Komodo. Wakil Presiden selaku Ketum Tim Koordinasi Lintas Kepariwisata mengarahkan agar dilakukan rapat koordinasi kepariwisataan setiap bulannya bertujuan untuk membahas progres untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, khususnya mancanegara, sehingga dapat mendongkrak devisa negara.

Gambar 3.1

Rapat Pengembangan Pariwisata 13 Februari 2019



2. Laporan analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan terkait laporan Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*).

Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat terbatas tentang percepatan pencegahan stunting bersama sejumlah menteri serta melakukan penandatanganan komitmen untuk melaksanakan "Optimalisasi Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita, serta Edukasi kepada Masyarakat untuk Percepatan Pencegahan Stunting". Komitmen ini merupakan upaya untuk memastikan penanganan dan percepatan pencegahan stunting di Indonesia dapat berjalan baik. Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap 23 kementerian/lembaga yang terlibat dalam program ini mampu bekerja keras untuk mencapai target bersama, yaitu angka prevalensi turun di bawah 20% pada tahun 2021. Beliau mengarahkan agar seluruh kementerian/lembaga terkait dapat bergerak cepat melakukan berbagai inisiatif dan inovasi untuk menangani dan mencegah *stunting*. Dengan tersedianya anggaran, sumber daya manusia, serta kemampuan kementerian/lembaga untuk mengkonvergensi berbagai

program tersebut hingga tingkat desa, Wakil Presiden Jusuf Kalla optimis seluruh program dapat berjalan lancar sehingga angka *stunting* Indonesia dapat terkoreksi.

Gambar 3.2 Rapat Terbatas Percepatan Pencegahan *Stunting* 14 Oktober 2019



3. Laporan analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan terkait penanganan bencana.

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Beberapa hal yang menjadi perhatian Wakil Presiden adalah penanganan pengungsi, pembangunan hunan tetap (*huntap*), status hukum aset lahan masyarakat di zona merah, tata ruang wilayah, validasi data penerima bantuan, pencairan dana stimulan, fasilitator pendamping masyarakat, serta ketersediaan bahan bangunan. Beliau menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah. Selain itu, ditekankan pula pentingnya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, media massa, maupun masyarakat.

**Gambar 3.3 Rapat Koordinasi Penanganan Bencana di
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah**



4. Laporan analisis kebijakan di bidang pemerintahan terkait rangkaian *Peace Building Process* bagi Masyarakat Afghanistan.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Republik Islam Afghanistan, Salahuddin Rabbani pada 15 Maret 2019 di Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa Indonesia mendukung penuh proses perdamaian di Afghanistan, salah satunya dengan *capacity building* di berbagai sektor. Wakil Presiden juga berharap generasi muda Afghanistan dapat belajar di Indonesia tentang isu pemilu, peran perempuan dalam pemerintahan, pertambangan, dan penelitian terkait biologi. Wakil Presiden menyatakan Pemerintah Indonesia akan segera mengirim utusan khusus untuk duduk bersama membahas langkah perdamaian berikutnya.

Laporan lainnya yang masih terkait dengan *Peace Building Process* bagi masyarakat Afghanistan adalah pelaksanaan rangkaian kegiatan *Dialogue on the Role of Women in Building and Sustaining Peace* pada 26-29 November 2019. Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin pada acara tersebut menyatakan bahwa Indonesia tetap berkomitmen kuat untuk mendukung proses perdamaian di Afghanistan tanpa kepentingan tertentu. Wakil Presiden juga menekankan pentingnya peran perempuan dalam upaya memupuk dan memelihara perdamaian, karena perempuan mampu menanamkan nilai toleransi dan perdamaian melalui pendidikan keluarga sejak dini.

Gambar 3.4 Rangkaian Kegiatan *Dialogue on the Role of Women in Building and Sustaining Peace*



5. Penyiapan bahan rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) tentang alih fungsi Eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional serta rekrutmen CPNS 2020.

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dalam rapat KPRBN pada 12 Desember 2019 menyatakan bawa penyederhanaan birokrasi harus dilakukan secara cermat, objektif, transparan, adil serta menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan kegaduhan. Beliau menekankan perlunya solusi yang memberikan dampak terkecil, memperhatikan prinsip keadilan, serta tetap menjaga kesejahteraan ASN. Dengan adanya alih fungsi eselon, diharapkan lembaga pemerintah menjadi semakin sederhana, simpel, dan lincah, karena kecepatan melayani adalah kunci bagi reformasi birokrasi.

Gambar 3.5 Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional



c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja pada IKU ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut.

- Dukungan SDM yang memiliki komitmen tinggi dalam menyelesaikan setiap pekerjaan walaupun jumlahnya terbatas;
- Tersedianya data dukung sebagai bahan penyusunan analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman, pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan, serta pemerintahan.
- Terjalannya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan Kementerian/Lembaga/Pemda dan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga mendukung proses pengumpulan data dukung penyusunan analisis kebijakan.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Dalam melaksanakan analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- Adanya perubahan preferensi Wakil Presiden atas penyajian bahan/laporan analisa kebijakan;
- Belum seluruh unit kerja memandaatkan atau memiliki Sitem Informasi untuk penyimpanan data dan informasi dalam proses penyusunan analisis kebijakan, sehingga hal ini mempengaruhi ketepatan waktu, konten, dan penyajian analisis kebijakan.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- Merumuskan penyajian bahan/laporan analisis kebijakan yang disesuaikan dengan preferensi Wakil Presiden
- Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam proses penyusunan analisis kebijakan

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah sebesar Rp 49.077.015.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 45.161.761.755,00 (92,02%).

SASARAN STRATEGIS 2:

Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 diukur dengan menggunakan enam indikator kinerja, yaitu IKU2, IKU3, IK4, IK5, IK6, dan IK7 Sekretariat Wakil Presiden. Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah sebesar Rp 217.295.600.000, 00 dengan realisasi sebesar Rp 180.634.200.772,00 (83,13%). Capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja tersebut sebagai berikut.

IKU2: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden**a) Analisis capaian kinerja *output***

Capaian *output* IKU ini adalah 100%, yaitu dari target 267 kegiatan yang termasuk lingkup pelayanan kerumahtanggaan, seluruhnya dapat dilaksanakan. Pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden meliputi beberapa kegiatan sebagaimana diuraikan dalam pada tabel 3.4 di bawah.

Tabel 3.6
Kegiatan Dukungan Layanan Kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden Tahun 2019

Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan
Penyediaan dan pelayanan jamuan acara kenegaraan (Wakil Presiden, Istri/Suami Wakil Presiden, tamu negara, dan kegiatan penting lainnya) serta jamuan operasional lainnya	137
Penyiapan dekorasi dalam rangka acara Wakil Presiden, Istri/Suami Wakil Presiden dan kegiatan kenegaraan lainnya	76
Melaksanakan pagelaran kesenian pada acara tamu negara dan acara-acara kenegaraan lainnya	1
Pemeliharaan dan penyiapan peralatan/perlengkapan acara tamu negara/resmi/penting lainnya/upacara/keseekretariatan	53
TOTAL	267

b) Analisis capaian kinerja *outcome*

Dalam penyusunan indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan (IKP) kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden dari perangkat melekat dengan Wakil Presiden. Responden dalam survei ini adalah perangkat melekat dengan Wakil Presiden yang terdiri dari: Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Deputi Bidang Administrasi, para

pejabat/pegawai Biro Protokol, Ajudan Wakil Presiden, dan Sekretaris Pribadi Wakil Presiden. Total responden dalam untuk survei ini adalah sebesar 69 orang.

Berdasarkan hasil penghitungan, bobot nilai rata-rata tertimbang untuk indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan (IKP) kerumahtanggaan adalah sebesar 0,100 (jumlah bobot dibagi dengan jumlah pernyataan). Selanjutnya, nilai tersebut akan dikalikan dengan nilai rata-rata tiap pernyataan sebagai berikut.

Tabel 3.7
Nilai Rata-rata Tiap Pernyataan Layanan Kerumahtanggaan

No.	Pernyataan	Nilai Pernyataan
1	Cita rasa jamuan sesuai permintaan	5,23
2	Dekorasi acara yang serasi	5,23
3	Berpenampilan rapih dalam memberikan layanan	5,22
4	Ramah dalam memberikan pelayanan	5,19
5	Memiliki komunikasi yang baik	5,16
6	Memiliki kepercayaan diri yang baik	5,23
7	Memahami kebutuhan sesuai selera Wakil Presiden	5,26
8	Memenuhi permintaan kelengkapan acara secara mendadak	5,17
9	Terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggaan di kantor Wakil Presiden	5,12
10	Terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggaan di kediaman Wakil Presiden	5,22
	Rata-rata	5,20

Berdasarkan tabel 3.7 di atas menunjukkan bahwa rata-rata jawaban dari responden terhadap kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden secara umum adalah baik. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggaan di kantor Wakil Presiden, komunikasi yang baik, dan memenuhi permintaan kelengkapan acara secara mendadak.

Selanjutnya, untuk mengetahui nilai indeks kelancaran dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$(5,23 \times 0,100) + (5,23 \times 0,100) + (5,22 \times 0,100) + (5,19 \times 0,100) + (5,16 \times 0,100) +$$

$$(5,23 \times 0,100) + (5,26 \times 0,100) + (5,17 \times 0,100) + (5,12 \times 0,100) + (5,22 \times 0,100) = \mathbf{5,20}$$

Nilai indeks adalah **5,20**

Dengan demikian, nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Nilai IKP setelah dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar = 5,20 X 25 = 130.
- Mutu pelayanan **A**.
- Kinerja pelayanan **Sangat Baik**.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja pada IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut.

- Sumber Daya Manusia yang tersedia memiliki komitmen yang tinggi dalam memenuhi target kinerja yang telah direncanakan;
- Adanya Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan pekerjaan sehingga pelaksanaan tugas berjalan optimal;
- Perencanaan yang baik atas anggaran dan kegiatan pelayanan kerumahtanggaan sehingga semua kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan baik sesuai jadwal yang telah dibuat sebelumnya;
- Koordinasi yang intensif baik dengan pihak internal maupun dengan pihak eksternal yaitu Kementerian/Lembaga/Pemda dan pihak terkait lainnya.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Terdapat beberapa permasalahan dalam menjalankan tugas tersebut, antara lain:

- Adanya penugasan mendadak yang merupakan limpahan acara Presiden atau pembatalan acara Wakil Presiden yang mendadak
- Belum terisinya formasi jabatan struktural dan fungsional pelaksana sesuai kebutuhan organisasi;
- Pergantian Wakil Presiden yang diikuti dengan pergantian perangkat Wakil Presiden berdampak pada berubahnya pola pelayanan karena setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan Protokol Sekretariat Presiden untuk acara pelimpahan dari Presiden;
- Mengajukan usulan pengisian jabatan struktural dan fungsional pelaksana yang masih kosong;
- Melakukan koordinasi yang intensif kepada para pejabat baru yang merupakan perangkat Wakil Presiden serta mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya terkait kebiasaan-kebiasaan dan karakteristik khusus dari Wakil Presiden.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai IKU 1 seluruhnya sebesar Rp 6.259.493.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 5.145.428.072,00 (82,20%).

IKU3: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden

a) Analisis capaian kinerja *output*

Capaian *output* IKU ini adalah 100%, yaitu dari 1.431 kegiatan yang termasuk lingkup pelayanan keprotokolan, seluruhnya dapat dilayani. Pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden meliputi beberapa kegiatan seperti yang dijelaskan pada tabel 3.8 dan tabel 3.9.

Tabel 3.8
Kegiatan Dukungan Layanan Keprotokolan
kepada Wakil Presiden Tahun 2019

Kegiatan Wakil Presiden	Jumlah Kegiatan
Kunjungan Tamu Negara	7
Kunjungan ke Luar Negeri	9
Kunjungan Kerja ke Daerah	75
Acara di Pusat (Jakarta)	460
Kunjungan Kehormatan/Audiensi	447
TOTAL	998

Tabel 3.9
Layanan Keprotokolan kepada Wakil Presiden Tahun 2019

Kegiatan Wakil Presiden	Jumlah Kegiatan
Penyiapan acara harian Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden	260
Penyiapan acara kunjungan kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke daerah	104
Penyiapan acara kunjungan kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke luar negeri	9
Penyiapan dan pendistribusian undangan acara Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden	31
Penyiapan dan pelaksanaan rapat/sidang yang dipimpin oleh Wakil Presiden	29
TOTAL	433

Beberapa kegiatan layanan keprotokolan kepada Wakil Presiden tahun 2019 sebagai berikut.

1. Kunjungan Tamu Negara

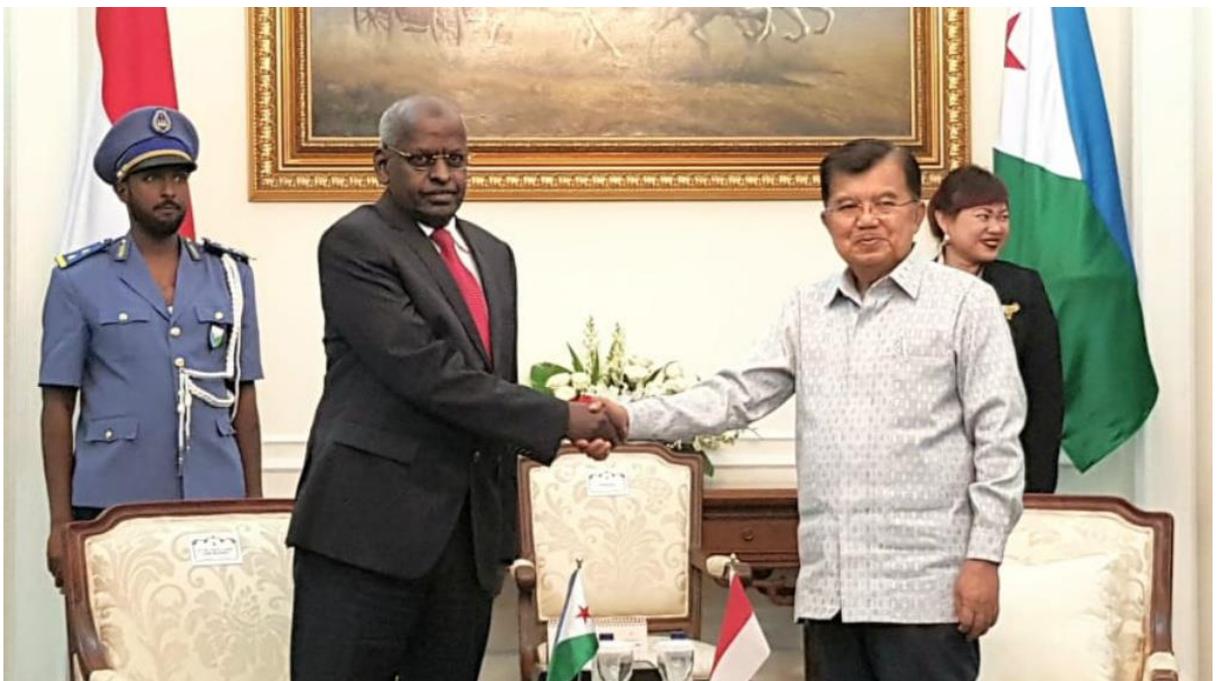
Wakil Presiden Jusuf Kalla, hingga masa jabatannya berakhir, telah menerima beberapa kunjungan tamu negara, antara lain:

- Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan Qatar, Sheikh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, pada 8 Januari 2019.

Pemerintah Qatar melalui Yayasan Kemanusiaan Kerajaan Qatar menawarkan bantuan untuk penanganan pascabencana di Lombok, Palu, dan Banten, termasuk rehabilitasi serta pembangunan masjid pascabencana. Dana bantuan tersebut bersumber dari dana wakaf. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi bantuan yang telah diberikan oleh Qatar, bahkan sejak tsunami Aceh pada 2004. Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia mengerahkan sumber daya untuk membangun 100 masjid dan madrasah baru di Lombok dan Palu.

- Perdana Menteri Republik Djibouti, Abdoukader Kamil Mohamed, di Istana Wakil Presiden, pada 14 Maret 2019.

Gambar 3.6. Kunjungan Perdana Menteri Republik Djibouti



Djibouti sedang berupaya mengurangi kebergantungannya pada impor minyak dengan mengembangkan sumber energi geotermal. Untuk itu, Djibouti berharap dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan energi geotermal karena Indonesia dipandang memiliki kapasitas di bidang ini. Tawaran kerja sama tersebut disambut baik oleh

Wakil Presiden Jusuf Kalla karena geotermal merupakan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Pengalaman Indonesia mengelola energi geotermal dapat dibagikan kepada tenaga ahli Djibouti. Pemerintah Indonesia dapat memberikan beasiswa/pelatihan teknis bagi para tenaga ahli tersebut.

- Wakil Presiden Republik Argentina, Gabriela Michetti, di Istana Wakil Presiden, pada 7 Mei 2019.

Pemerintah Argentina menginginkan kerja sama di bidang investasi dan perdagangan direalisasikan lebih konkret, misalnya dalam bentuk *joint venture*. Pemerintah Argentina juga mengharapkan kerja sama dengan Indonesia di berbagai sektor, khususnya bioteknologi pertanian. Menanggapi keinginan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa Indonesia sangat terbuka terhadap investasi asing. Untuk itu, Pemerintah Argentina diundang hadir pada *Indonesia–Latin America and the Caribbean (Ina-Latamcar) Business Forum 2019* dan Trade Expo Indonesia (TEI), pada Oktober 2019.

Setelah pelantikannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menerima beberapa kunjungan tamu negara, antara lain:

- Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Wang Qishan, di Istana Wakil Presiden, pada 20 Oktober 2019.

Gambar 3.7 Kunjungan Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok



Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan investasi Tiongkok di Indonesia semakin besar dan kerja sama kedua negara di bidang pendidikan sebagai bentuk peningkatan sumber daya manusia dapat semakin baik mengingat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan vokasi juga merupakan fokus utama Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ini sejalan dengan keinginan Pemerintah Tiongkok untuk lebih meningkatkan hubungan baik Tiongkok dan Indonesia yang saling menguntungkan kedua negara, termasuk di bidang pendidikan dasar dan kualitas sumber daya manusia.

- Wakil Presiden Republik Sosialis Vietnam, Dang Thi Ngoc Thinh, pada 20 Oktober 2019.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung keinginan Pemerintah Vietnam dalam peningkatan investasi dan perdagangan untuk meraih target nilai perdagangan kedua negara sebesar US\$10 miliar pada 2020 serta upaya penciptaan situasi yang kondusif di ASEAN sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara-negara ASEAN. Selain itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyatakan dukungan Pemerintah Indonesia kepada Vietnam sebagai Ketua ASEAN 2020 dan pencalonan Vietnam sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2020–2021.

- Wakil Presiden Myanmar, U Henry Van Thio, di Istana Wakil Presiden, pada 20 Oktober 2019.

Pemerintah Indonesia dan Myanmar memiliki tantangan yang relatif sama, yaitu multietnis dan multiagama. Indonesia sangat memahami kondisi Myanmar dan berharap dapat membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di Myanmar. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga akan mempertimbangkan undangan Wakil Presiden U Henry Van Thio untuk berkunjung ke Myanmar guna membahas potensi kerja sama kedua negara.

2. Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

Dalam rangka menguatkan hubungan kerja sama Indonesia dengan negara lain, baik bilateral, regional, maupun multilateral, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin telah melakukan beberapa kunjungan kenegaraan, antara lain:

- Kunjungan Kerja ke Kamboja, pada 14–16 Januari 2019.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri Konferensi Dewan Kebudayaan Asia (*Asian Cultural Council Summit*) dalam rangka memenuhi undangan resmi dari Perdana Menteri Kamboja selaku *Honorary Founding Chairman* Dewan Kebudayaan Asia. Pada *official launching ceremony* dan *gala dinner* Dewan Kebudayaan Asia di Elephant Terrace, Angkor Park, Wakil Presiden Jusuf Kalla dinobatkan sebagai Asian Cultural Wiseman karena pengetahuan, reputasi, dan kiprahnya di dunia internasional, termasuk dalam pembentukan Dewan Kebudayaan Asia. Dewan Kebudayaan Asia dibentuk di bawah kerangka kerja

International Conference of Asian Political Parties (ICAPP). Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan pembentukan Dewan Kebudayaan Asia dapat memperkuat dan meningkatkan kerja sama negara-negara di kawasan Asia, termasuk dapat mempromosikan identitas negara-negara di Asia yang penuh damai, toleran, dan saling peduli. Hal tersebut sangat penting untuk membangun kembali peradaban dunia yang lebih damai.

- Kunjungan Kerja ke Republik Rakyat Tiongkok, pada 24–28 April 2019.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mewakili Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi *Belt and Road Forum II*, di Beijing. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengangkat isu diskriminasi kelapa sawit Indonesia oleh sejumlah negara, terutama di Eropa. Diskriminasi ini berpengaruh terhadap pencapaian cita-cita pembangunan berkelanjutan (SDGs) Indonesia sehingga harus dilawan. Tidak ada satu pun negara yang bisa mencapai SDGs sendiri tanpa sinergi dan kerja sama dengan negara lain, termasuk melalui *Belt and Road Forum*. Kerja sama harus bersifat *national-driven* dan bukan *donor/loan-giver driven*, harus mempertimbangkan inklusivitas, serta harus ada prinsip-prinsip multilateralisme dan bukan *“me first policy”*. Pada forum terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa proyek yang akan dikerjasamakan Indonesia dalam *Belt and Road Forum II* harus menyertakan catatan inisiatif bersama Indonesia-Tiongkok. Indonesia tidak ingin proyek yang dikerjasamakan dalam *Belt and Road Forum II* inisiatif dari Tiongkok semata.

Gambar 3.8 Konferensi Tingkat Tinggi *Belt and Road Forum II*



- Kunjungan Kerja ke Swiss, pada 14–18 Mei 2019.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri *Global Platform for Disaster Risk Reduction* (GPDRR), di Jenewa. Pada forum ini, Indonesia berbagi pengalaman dalam mengatasi bencana karena Indonesia memiliki banyak pengalaman dalam menyelesaikan berbagai bencana alam yang diakui dunia internasional. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kembali komitmen Indonesia dan mengajak negara-negara lain untuk turut memajukan kerja sama internasional, khususnya memastikan implementasi Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015–2030. Tidak ada satu pun negara yang dapat menghadapi sendiri dampak dari bencana.

Sebelum ke Swiss, Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan lawatan ke Paris memenuhi undangan Presiden Prancis untuk berbicara mengenai terorisme pada *Christchurch Call to Action*. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan serangan teror di Christchurch mencerminkan kebangkitan islamofobia dan xenofobia sebagai ancaman global. Untuk menangkalnya, harus dibangun ketahanan dan solidaritas masyarakat dari berbagai latar belakang. Caranya adalah dengan mempromosikan dialog antaragama untuk memperkuat nilai toleransi dalam masyarakat serta menyuntikkan budaya damai sejak usia dini. Upaya ini perlu melibatkan kaum muda karena saat ini, teknologi menjadi media baru yang digunakan oleh teroris. Di Indonesia saja, sekitar 63 dari 150 juta pengguna internet adalah kaum muda. Kaum muda harus diberdayakan dalam menyebarkan pesan-pesan damai untuk melawan ide-ide ekstrem dan penuh kebencian dengan menggunakan internet.

- Kunjungan kerja ke Jepang, 21-22 Oktober 2019

Mengawali tugas sebagai wakil presiden, K.H. Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Jepang, pada 21–22 Oktober 2019, untuk menghadiri penobatan Kaisar Jepang Naruhito. Pada pertemuannya dengan mantan Perdana Menteri Jepang, Yasuo Fukuda, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan dengan Jepang dalam 5 tahun ke depan mengingat Jepang adalah salah satu mitra strategis Indonesia, baik dari segi perdagangan, investasi, atau pun pariwisata. Lebih lanjut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia menjadi program prioritas Pemerintah Indonesia.

Pada kunjungannya ke Jepang tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga bertemu dengan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong XVI dan mempergunakan kesempatan untuk mengajak Malaysia bekerja sama dalam melawan diskriminasi kelapa sawit dan menangkal radikalisme.

3. Kunjungan Kerja ke Daerah

Wakil Presiden Jusuf Kalla telah melaksanakan beberapa kunjungan kerja ke daerah selama tahun 2019, seperti menghadiri acara seremonial, melaksanakan peninjauan lapangan, dan melaksanakan rapat kerja dengan daerah. Berikut adalah rangkuman beberapa kunjungan tersebut.

- Penutupan Milad ke-80 Pondok Pesantren Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) Mangkoso dan Penandatanganan Prasasti sebagai Tanda Peresmian Rumah Susun Pondok Pesantren DDI Mangkoso, di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, pada 20 Januari 2019.

Wakil Presiden Jusuf Kalla memandang pondok pesantren yang berjumlah sangat banyak di Indonesia sebagai kekuatan untuk memajukan ekonomi umat. Selain mengajarkan ilmu agama, pondok pesantren juga harus memperhatikan kemampuan teknis dan keahlian para santri sehingga para santri memiliki daya saing dan mampu mengikuti perkembangan dunia. Semua pesantren harus mampu mendorong santrinya masuk ke dunia usaha agar kehidupan ekonomi menjadi berimbang. Dengan demikian, kebaikan dunia dan akhirat akan tercapai.

Gambar 3.9 Penandatanganan Prasasti di Pondok Pesantren Darud Da'wah wal Irsyad



- Pembukaan 2019 *International Reform Policy Symposium and Regional Workshop*, di Bali Nusa Dua Convention Center, Provinsi Bali, pada 14 Maret 2019.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan perkembangan reformasi di Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun terakhir yang inti perubahannya adalah dari semula negara sentralistik dan otoriter menjadi negara yang terdesentralisasi dan sangat terbuka. Di negara demokrasi, yang menjadi penentu adalah keinginan rakyat dan kebenaran berada di tangan rakyat. Hal ini mengakibatkan perubahan yang mendalam dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan saat ini dituntut berubah menjadi lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien. Perubahan sistem pemerintahan juga harus diikuti dengan perubahan cara, pengetahuan, dan kemampuan aparatur pemerintah serta didukung dengan penerapan teknologi. Birokrasi yang

lambat dan berbiaya mahal serta aparat yang bertindak korup akan menyebabkan pelaku bisnis dan investasi meninggalkan suatu negara atau daerah.

- Rapat tentang Pelabuhan Batu Ampar, di Kantor Pusat Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada 2 April 2019.

Rapat tersebut merupakan lanjutan dari arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai penurunan biaya pengiriman kontainer Batam-Singapura serta pengembangan Pelabuhan Batu Ampar sebagai *international logistics hub*. Pada rapat kali ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyetujui rencana aksi pengembangan Pelabuhan Batu Ampar yang telah disiapkan oleh BP Batam. Lebih lanjut, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta, di antaranya PT Pelindo I (Persero) melengkapi Pelabuhan Batu Ampar dengan *gantry crane* dan fasilitas lain yang diperlukan bagi peningkatan layanan pemindahan kontainer oleh *shipping lines* internasional. Target pengembangan bukan untuk bersaing secara langsung dengan Pelabuhan Singapura, melainkan lebih penting untuk mengambil manfaat dari fasilitas yang tidak dimiliki oleh Pelabuhan Singapura. Selain itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyinggung keputusan pemerintah untuk menghapuskan dualisme kepemimpinan Wali Kota Batam dan BP Batam guna memberikan kepastian investasi.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pada awal masa jabatannya, juga melaksanakan beberapa kunjungan kerja ke daerah untuk menghadiri acara seremonial. Berikut adalah rangkuman beberapa kunjungan tersebut.

- Pembukaan Pagelaran Festival Budaya Santri Nusantara 2019, di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, pada 27 Oktober 2019.

Gambar 3.10 Pembukaan Pagelaran Festival Budaya Santri Nusantara 2019



Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menekankan bahwa arus baru ekonomi Indonesia harus mendorong kemajuan ekonomi hingga ke level bawah sehingga terjadi keseimbangan

antara pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan konglomerat. Di sisi lain, Indonesia akan semakin maju hanya jika memiliki manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak. Oleh karena itu, santri harus memiliki pengetahuan yang cukup sehingga siap berada di lingkungan apa pun. Santri harus menjadi pelopor pembangunan ekonomi nasional.

- Pembukaan *The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2019), Short Course and Call For Paper*, di The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Provinsi Bali, pada 4 November 2019.

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya; bukan hanya dalam bentuk *obligation of result*, melainkan sekaligus dalam bentuk *obligation of conduct*. Artinya, negara merancang suatu kebijakan dengan menimbang aspek konstitusionalitas dan aspek hasil. Di sinilah peran Mahkamah Konstitusi dapat diperkuat dan dipertegas. Terlebih di dunia yang saat ini nyaris tanpa sekat, di mana informasi sangat mudah didapat dan perubahan demikian cepat; hukum dituntut lebih siap dan sigap. Arus informasi dan perubahan sangat cepat berdampak pada semakin meleknya warga negara atas hak sosial dan ekonominya. Makna dan tafsiran hak sosial dan ekonomi sangat mungkin semakin berkembang dan meluas.

- *International Halal & Thayyib Conference 2019*, di Universitas Brawijaya, Malang, Provinsi Jawa Timur, pada 27 November 2019.

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin memaparkan besarnya pangsa pasar produk halal untuk produk makanan, farmasi, kosmetik, busana muslim, media dan hiburan, serta pariwisata. Namun, ironinya selama ini Indonesia hanya memainkan peran sebagai penjamin dan pendukung produk halal. Ekspor Indonesia saat ini masih sekitar 3,8% dari total pasar halal dunia. Indonesia bahkan menjadi konsumen terbesar produk halal dengan nilai belanja US\$214 miliar atau 10% dari pangsa pasar halal dunia pada 2018. Melihat kondisi ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku akan lebih bahagia jika Indonesia mampu menjadi produsen dan bahkan pengeksport produk halal. Dalam hal ini, penting bahwa pengembangan produk halal harus memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat. Pengembangan produk halal, termasuk industri halal, harus didasarkan pada kepentingan umat, bangsa, dan negara dengan visi untuk menyediakan produk terbaik dan bermanfaat (halal dan *thayyib*) serta tidak mengeksploitasi label halal atau simbol Islam. Pengembangan produk halal juga harus bersifat universal, bukan hanya bagi umat muslim, melainkan juga bagi seluruh kehidupan masyarakat tanpa memandang perbedaan.

4. Acara di Pusat

- Rapat tentang Skema Bantuan Pengadaan Rumah Milik untuk ASN, TNI, dan Polri, di Kediaman Wakil Presiden, pada 21 Februari 2019.

Rapat tersebut merupakan rapat ke-19 dalam rangkaian rapat membahas pengadaan rumah bagi ASN/TNI/Polri. Rapat ini menetapkan 8 poin dalam skema pengadaan rumah milik bagi ASN/TNI/Polri, di antaranya bantuan diberikan dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR) dengan suku bunga sebesar 5% berlaku tetap dengan maksimum tenor 20 tahun, harga rumah tidak dibatasi dan maksimum KPR yang dapat diberikan sebesar Rp300 juta dengan uang muka minimum 0% dari harga rumah, serta bantuan uang muka sebesar Rp4 juta dimaksudkan untuk meringankan beban biaya administrasi pembelian rumah.

- *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Signing Ceremony and Business Forum*, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada 4 Maret 2019.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi tim negosiasi yang telah bekerja keras mewujudkan perjanjian IA-CEPA yang berkualitas tinggi dan menjadi *win-win solution* bagi kedua negara. IA-CEPA merupakan tonggak baru bagi hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang akan meningkatkan kepercayaan dan membangun rasa percaya diri kedua belah pihak karena memberikan peluang bisnis yang lebih besar dan lebih luas. Berbeda dengan perjanjian lain, IA-CEPA dibangun berdasarkan tujuan strategis yang jelas, yaitu untuk tumbuh bersama dan saling melengkapi. Perjanjian ini tidak hanya mencakup bidang perdagangan, tetapi juga bidang jasa dan investasi serta bidang pembangunan sumber daya manusia. IA-CEPA perlu segera untuk sepenuhnya diimplementasikan dan diwujudkan dalam program kerja sama lebih lanjut.

- Rapat tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*), di Kantor Wakil Presiden, pada 1 November 2019

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin memimpin rapat pleno perdana Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga menjabat Ketua TNP2K mengingatkan tantangan dalam penanggulangan kemiskinan dan pencegahan *stunting* masih sangat besar, terutama dalam konvergensinya. Koordinasi menjadi hal yang penting dalam program ini. Oleh karena itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri menyiapkan langkah koordinasi yang efektif dan sampai ke level terbawah di daerah.

- Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2019, di Istana Wakil Presiden, pada 21 November 2019.

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menyatakan bahwa keterbukaan dan transparansi menjadi penting dalam upaya mewujudkan pemerintah yang bersih, efektif, dan tepercaya. Badan publik harus mampu menjadi rujukan pertama masyarakat untuk mendapatkan informasi serta penangkal hoaks dan disinformasi yang dapat menyesatkan masyarakat. Badan publik harus pula menunjukkan konsistensi dan komitmennya demi lebih membangun dan meningkatkan kepercayaan publik. Di tengah masyarakat yang saat ini memiliki peran aktif sebagai penyebar informasi akibat pesatnya perkembangan teknologi, badan publik perlu mengedepankan komunikasi dua arah sehingga dapat mendorong partisipasi dalam perumusan kebijakan publik atau pun implementasi pembangunan.

Acara-acara resmi Wakil Presiden tersebut telah didokumentasikan dalam bentuk notulen yang berisi pokok pembicaraan Wakil Presiden pada saat menghadiri audiensi, rapat, peresmian acara di pusat dan pada saat melakukan kunjungan kerja ke daerah serta luar negeri. Dokumentasi notulen Wakil Presiden pada tahun 2019 berjumlah 369 notulen dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Tabel 3.10
Rekapitulasi Notulen Wakil Presiden

Jenis Kegiatan	Jumlah Notulen
Audiensi	263
Rapat / Rapat Intern	46
Kunjungan Kerja	60
Total	369

b) Analisis capaian kinerja *outcome*

Dalam penyusunan indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan (IKP) keprotokolan kepada Wakil Presiden digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden dari perangkat melekat dengan Wakil Presiden. Responden dalam survei ini adalah perangkat melekat dengan Wakil Presiden yang terdiri dari: Kepala Sekretariat Wakil Presiden, para Deputi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Sekretaris Pribadi Wakil Presiden, Ajudan Wakil Presiden, Dokter Pribadi Wakil Presiden, pejabat/pegawai Biro Protokol, Tim Notulis Wakil Presiden, pengemudi rangkaian, Pasukan Pengamanan Presiden Grup B, pejabat dan pegawai Bidang Peliputan dan Dokumentasi, serta pejabat

dan pegawai Subbagian Ketertiban dan Keamanan Dalam. Total responden dalam survei ini adalah sebesar 97 orang.

Berdasarkan hasil penghitungan, bobot nilai rata-rata tertimbang untuk indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan (IKP) kerumahtanggaan adalah sebesar 0,067 (jumlah bobot dibagi dengan jumlah pernyataan).

Selanjutnya, nilai tersebut akan dikalikan dengan nilai rata-rata tiap pernyataan sebagai berikut.

Tabel 3.11
Nilai Rata-rata Tiap Pernyataan Layanan Keprotokolan

No.	Pernyataan	Nilai Pernyataan
1	Tata tempat, tata upacara, tata penghormatan pada acara Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan	5,49
2	Berpenampilan rapi dalam memberikan pelayanan	5,47
3	Ramah dalam memberikan pelayanan	5,33
4	Memiliki komunikasi yang baik dalam memberikan pelayanan	5,27
5	Memiliki kepercayaan diri yang baik dalam memberikan pelayanan	5,31
6	Memastikan peralatan dan perlengkapan acara Wakil Presiden berfungsi dengan baik	5,30
7	Cepat tanggap dalam mengatur dinamika acara Wakil Presiden	5,30
8	Acara tersusun dengan sistematis, sesuai arahan dan perkenan Wakil Presiden	5,32
9	Kebutuhan akomodasi Wakil Presiden terpenuhi dengan baik	5,27
10	Menyediakan keperluan administrasi perjalanan dengan baik	5,30
11	Bersedia dihubungi sewaktu-waktu	5,29
12	Memenuhi permintaan notulen sesuai prosedur	5,28
13	Notulen kegiatan Wakil Presiden telah didokumentasikan dengan tertib	5,36
14	Kerahasiaan notulen Wakil Presiden dapat terjaga dengan baik	5,35
15	Notulen acara Wakil Presiden memiliki kualitas yang baik dari segi bahasa dan substansi	5,29
	Rata-rata	5,33

Berdasarkan tabel 3.11 menunjukkan bahwa rata-rata jawaban dari responden terhadap kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden secara umum adalah baik. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah komunikasi yang baik dalam memberikan pelayanan, kebutuhan akomodasi Wakil Presiden terpenuhi, dan pemenuhan permintaan notulen yang sesuai prosedur.

Selanjutnya, untuk mengetahui nilai indeks kelancaran dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(5,49 \times 0,067) + (5,47 \times 0,067) + (5,33 \times 0,067) + (5,27 \times 0,067) + (5,31 \times 0,067) + \\ (5,30 \times 0,067) + (5,30 \times 0,067) + (5,32 \times 0,067) + (5,27 \times 0,067) + (5,30 \times 0,067) + \\ (5,29 \times 0,067) + (5,28 \times 0,067) + (5,36 \times 0,067) + (5,35 \times 0,067) + (5,29 \times 0,067) = \mathbf{5,33}$$

Nilai Indeks adalah **5,33**

Dengan demikian, nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai IKP setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $5,33 \times 25 = 133,25$
- Mutu pelayanan **A**.
- Kinerja pelayanan **Sangat Baik**.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja pada IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut.

- Sumber Daya Manusia yang tersedia memiliki komitmen yang tinggi dalam memenuhi target kinerja yang telah direncanakan;
- Adanya Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan pekerjaan sehingga kelancaran pelaksanaan tugas dapat optimal;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- Perencanaan yang baik atas anggaran dan kegiatan pelayanan keprotokolan dengan memperhitungkan penugasan mendadak Wakil Presiden yang merupakan penugasan Presiden sehingga semua kegiatan dapat diselesaikan dengan baik;
- Penyusunan jadwal penugasan petugas protokol dengan memperhitungkan penugasan mendadak kegiatan Wakil Presiden;
- Koordinasi yang intensif baik dengan pihak internal maupun dengan pihak eksternal yaitu Kementerian/Lembaga/Pemda dan pihak terkait lainnya.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Terdapat beberapa permasalahan dalam melaksanakan tugas ini, antara lain:

- Dinamika kegiatan Wakil Presiden yang tinggi karena mendapat pelimpahan acara yang mendadak dari Presiden;
- Masih terdapat fungsional pelaksana yang belum memenuhi standar kompetensi
- Penataan ruang kerja belum mendukung terwujudnya koordinasi yang efektif dan efisien;

- Pergantian Wakil Presiden dan perangkatnya mengakibatkan perubahan pola pelayanan karena tiap individu memiliki karakteristik berbeda.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan antara lain:

- Menyiapkan rencana kontijensi dan menyusun jadwal penugasan petugas protokol dengan mempertimbangkan acara mendadak;
- Memberikan kesempatan bagi fungsional pelaksana mengikuti diklat teknis/kedinasan atau diklat-diklat lain yang dapat meningkatkan kompetensi;
- Mengajukan usulan penataan ruang kerja; dan
- Melakukan koordinasi kepada perangkat Wakil Presiden serta mengumpulkan informasi terkait karakteristik khusus dari Wakil Presiden.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai IKU tersebut adalah sebesar Rp 136.958.406.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 103.736.867.047,00 (75,74%).

IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan

a) Analisis capaian kinerja *output*

Pada tahun 2019, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%. Ada 3.431 kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang seluruhnya telah diselesaikan, yaitu:

Tabel 3.12

Kegiatan Pers, Media, dan Pelayanan Informasi serta Dokumentasi Kegiatan Wakil Presiden dan Acara Lainnya di Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah
1	Layanan Kewartawanan	
	- Pencetakan ID card wartawan	200
	- Penjadwalan Koordinator Lapangan	545
2	Peliputan dan Dokumentasi	
	- Foto dan video kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden	609
	- Foto dan video kegiatan Sekretariat Wakil Presiden	118
	- Transkrip kegiatan Wakil Presiden	188
	- Audio kegiatan Wakil Presiden	247
	- Layanan permohonan foto/video dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden/Kesekretariatan baik langsung maupun <i>online</i>	541

3	Diseminasi Informasi	
	- Publikasi liputan kegiatan Wakil Presiden melalui <i>website</i>	491
	- Publikasi liputan kegiatan Wakil Presiden melalui media sosial	671
	- Publikasi liputan kegiatan Wakil Presiden melalui Majalah Mersela	1
	Total	3.431

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Pada tahun 2019, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu terdapat 3.431 kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan dan menjadi sumber keterbukaan informasi kepada publik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- adanya komitmen yang tinggi dari setiap SDM untuk mencapai target kinerja;
- penyusunan jadwal penugasan SDM bagi setiap kegiatan peliputan Wakil Presiden baik yang terjadwal maupun antisipasi penugasan mendadak;
- membuat rencana kontijensi atas pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- tersedianya Standar Operasional Prosedur dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden serta acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden; dan
- koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan yang terkait.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Dalam melaksanakan kegiatannya, terdapat beberapa kendala antara lain:

- Belum adanya monitoring tools pemberitaan Wakil Presiden untuk mendukung implementasi strategi komunikasi publik yang cepat, akurat, dan terkini bagi Wakil Presiden;
- Kurang optimalnya upaya digitalisasi pelaporan kegiatan pengkoordinasian wartawan dalam peliputan acara Wakil Presiden;
- Belum tersedianya fasilitas *press room* yang memadai di Istana Wakil Presiden;
- Belum adanya tenaga penerjemah untuk berita di situs www.wapresri.go.id, sehingga berita tersebut tidak akomodatif bagi pembaca asing;
- Belum optimalnya peran media sosial, khususnya terkait dengan pengelolaan konten digital, untuk mendukung diseminasi informasi capaian kinerja Wakil Presiden; dan
- Dukungan sarana dan prasarana untuk peliputan dan dokumentasi acara atau kegiatan Wakil Presiden belum memadai.

Solusi untuk permasalahan di atas yaitu:

- Menjajaki kemungkinan pengadaan *monitoring tools* bekerja sama dengan *digital platform provider* yang dapat memenuhi kualifikasi.
- Mengoptimalkan penggunaan form *e-report* bagi koordinator lapangan yang bertugas.
- Melakukan koordinasi dengan Biro Umum untuk mengajukan penataan kembali *press room* di Istana Wakil Presiden.
- Menjajaki kemungkinan pengadaan penerjemah untuk berita di situs www.wapresri.go.id dari lingkungan internal Sekretariat Wakil Presiden.
- Mempersiapkan pembentukan tim kecil media sosial untuk memaksimalkan pengelolaan konten media sosial.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai indikator kinerja lainnya tersebut seluruhnya sebesar Rp 184.355.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 182.400.755,00 (98,94%).

IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan

a) Analisis capaian kinerja output

Pada tahun 2019, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%. Terdapat 44.189 pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang seluruhnya telah diselesaikan, yaitu:

Tabel 3.13
Pelayanan Administrasi Umum di Lingkungan
Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019

No.	Jenis	Jumlah
1	Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI	3
2	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Sekretariat Wakil Presiden	9
3	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Sekretariat Wakil Presiden	17
4	Berkas pertanggungjawaban (UP dan LS) yang diverifikasi	3.845
5	Surat Perintah Membayar (SPM)	2.211
6	Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bendahara	12
7	Laporan Akuntansi Keuangan	10
8	Laporan Akuntansi Barang Milik Negara (BMN)	5
9	Perjanjian Kinerja pejabat dan/atau pegawai Sekretariat Wakil Presiden	360
10	Rencana Aksi Sekretariat Wakil Presiden	17
11	Laporan Kinerja di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden	21

12	Penanganan surat/memorandum masuk	5.081
13	Penanganan/penomoran surat keluar (biasa dan rahasia)	2.153
14	Pendistribusian surat/memorandum di internal dan eksternal	1.649
15	Pendataan dan penataan arsip	161
16	Pencetakan buku acara kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden	3.991
17	Penggandaan dan penjilidan dokumen	12.748
18	Pencetakan kartu ucapan/sertifikat	162
19	Peta Jabatan Sekretariat Wakil Presiden	13
20	Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Wakil Presiden	13
21	Pengurusan kenaikan pangkat	64
22	Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat Wakil Presiden	13
23	Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Sekretariat Wakil Presiden	275
24	Pengurusan pensiun	12
25	Penghargaan Satyalancana Wira Karya dan Satyalancana Karya Satya	18
26	Penegakan hukuman disiplin pegawai	4
27	Cuti besar, cuti sakit, dan cuti bersalin	586
28	Laporan perkawinan, penambahan anak, dan kematian	21
29	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	110
30	Daftar pengunjung ke poliklinik umum	2.648
31	Daftar pengunjung ke poliklinik gigi	685
32	Pengadaan obat-obatan Sekretariat Wakil Presiden	3
33	Pengadaan obat-obatan Dokter Pribadi Kepresidenan	12
34	Laporan kasus pasien	3.153
35	Laporan pemasukan, pengeluaran, dan saldo obat-obatan pada poliklinik umum dan gigi	12
36	Pengadaan, perawatan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan	305
37	Pengadaan, perawatan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan	362
38	Pengadaan, perawatan, serta pemeliharaan kendaraan dan ketertiban dalam	324
39	Daftar pengunjung perpustakaan	2.974
40	Pengadaan bahan pustaka	125
41	Pelaporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	1
42	Pelayanan kerumahtanggaan kepada Sekretariat Wakil Presiden	1
Total		44.189

b) **Capaian Kinerja *Outcome***

Pada tahun 2019, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu terdapat 44.189 pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan dan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pimpinan.

c) **Faktor Pendukung Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja lainnya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- Tingginya kompetensi dan komitmen yang dimiliki oleh pejabat/pegawai sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan dan mencapai target kinerja;
- Tersedianya Standar Operasional Prosedur, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis terkait pelayanan administrasi umum;
- Pengawasan internal secara berjenjang berlangsung dengan baik;
- Tersedianya *database* untuk menyimpan dokumen dan data di tiap unit kerja;
- Komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan, baik pihak internal maupun eksternal;

d) **Permasalahan/Kendala dan Solusi**

Terdapat beberapa permasalahan dalam memberikan pelayanan administrasi umum ini, antara lain:

- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti masih melakukan pekerjaan secara manual dan belum melakukan digitalisasi dokumen;
- Belum meratanya kemampuan SDM dalam mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi yang telah diterapkan; dan
- Belum optimalnya pengembangan kapasitas SDM yang berdasarkan pada *talent mapping* dan *training needs analysis*.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan sehari-hari, baik melalui pengembangan aplikasi, maupun dengan rutin melakukan himbauan menggunakan aplikasi yang tersedia (SPDE Open);
- Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan;

- Mengadakan pelatihan bagi pejabat/pegawai berdasarkan *talent mapping* dan *training needs analysis*.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai indikator kinerja lainnya tersebut seluruhnya sebesar Rp 59.293.346.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 57.112.516.918,00 (96,32%).

IK6: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden

Capaian indikator kinerja lainnya ini adalah 1 laporan (100%), tersusunnya laporan pengelolaan Dana Operasional dan Bantuan (DOB) Wakil Presiden. DOB adalah dana yang digunakan untuk menunjang kegiatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Wakil Presiden yang pengeluarannya dilakukan berdasarkan perintah/kewenangan Wakil Presiden. Pada tahun 2019, dalam dokumen DOB, terdapat 12 laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DOB.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai indikator kinerja lainnya tersebut di atas adalah sebesar Rp 14.600.000.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp 14.456.987.980,00 (99,02%).

IK7: Jumlah laporan program, anggaran, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun

Capaian indikator kinerja lainnya ini adalah 2 dokumen (100%), tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018 dan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018. Renja Sekretariat Wakil Presiden merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), disusun untuk periode satu tahun.

3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kerja

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2019

Sekretariat Wakil Presiden berhasil melebihi target indikator kerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi yang mencapai 100% dan nilai indeks yang dicapai berada di atas target, yaitu di atas 4,44 untuk IKU2 dan IKU3.

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas Wakil Presiden	IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100% (369 laporan)	100%
2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	IKU2: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	4,44	5,20	100%
		IKU3: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	4,44	5,33	100%
		IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%	100% (3.431 kegiatan)	100%
		IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%	100% (44.189 kegiatan)	100%
		IK6: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden	1Laporan	1 Laporan	100%
		IK7: Jumlah laporan program, anggaran, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan 2019

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2019, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kinerja dari nilai indeks kualitas pelayanan dan indikator kinerja lainnya. Hal ini dapat terwujud karena komitmen yang tinggi seluruh jajaran pimpinan beserta staf untuk terus melakukan perbaikan kinerja. Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018 dan 2019

Tahun 2018				Tahun 2019			
IKU	Target	Realisasi	Capaian	IKU	Target	Realisasi	Capaian
IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100% (365 Laporan)	100%	IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100% (369 Laporan)	100%
IKU2: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga kepada Wakil Presiden	4,44	5,28	100%	IKU2: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga kepada Wakil Presiden	4,44	5,20	100%
IKU3: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	4,44	5,32	100%	IKU3: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	4,44	5,33	100%
IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%	100% (2.910 kegiatan)	100%	IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%	100% (3.431 kegiatan)	100%
IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%	100% (49.401 kegiatan)	100%	IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%	100% (44.189 kegiatan)	100%
IK6: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden	1 laporan	1 laporan	100%	IK6: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden	1 laporan	100%	1 laporan
IK7: Jumlah laporan program, anggaran, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%	IK7: Jumlah laporan program, anggaran, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun	2 dokumen	100%	2 dokumen
			100%	Rata-rata Capaian IKU			100%

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja IKU Tahun 2015 s.d 2019

Mengingat tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam pencapaian tujuan jangka menengah, untuk itu Sekretariat Wakil Presiden terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja dengan menyusun program kegiatan di Tahun 2020 didasarkan pada evaluasi kinerja Sekretariat Wakil Presiden yang dicapai sejak tahun 2015 s.d 2019. Perbandingan capaian kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.16

Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015 s.d 2019

Tahun 2015				Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018			Tahun 2019		
IKU	Target	Realisasi	Capaian	IKU	Target	Realisasi	Capaian	IKU	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100% (45 laporan)	100%	IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100% (28 Laporan)	100%	IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100% (324 Laporan)	100%	100%	100% (366 laporan)	100%	100%	100% (369 laporan)	100%
IKU2: Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	100%	100% (1.245 kegiatan)	100%	IKU2: Indeks kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	4,33	5,16	100%	IKU2: Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	4,33	5,30	100%	4,44	5,28	100%	4,44	5,20	100%
IKU3: Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	100%	100% (1.112 kegiatan)	100%	IKU3: Indeks kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	4,33	5,13	100%	IKU3: Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	4,33	5,16	100%	4,44	5,32	100%	4,44	5,33	100%
								IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta	100%	100% (1.605 kegiatan)	100%	100%	100% (2.910 kegiatan)	100%	100%	100% (3.431 kegiatan)	100%

				dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan									
				IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%	100% (29.669 kegiatan)	100%	100%	100% (49.401 kegiatan)	100%	100% (44.189 kegiatan)	100%	
				IK6: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
				IK7: Jumlah laporan program, anggaran, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
Rata-rata Capaian IKU	100%	Rata-rata Capaian IKU	100%	Rata-rata Capaian IKU			100%	Rata-rata Capaian IKU		100%	Rata-rata Capaian IKU	100%	

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan, baik yang mendukung langsung IKU Sekretariat Wakil Presiden yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, maupun kegiatan-kegiatan yang tidak secara langsung mendukung IKU Sekretariat Wakil Presiden (indikator kinerja lainnya). Berikut matriks pagu anggaran kegiatan IKU dan indikator kinerja lainnya pada Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019.

Tabel 3.17
Pagu Anggaran Kegiatan IKU dan IK Sekretariat Wakil Presiden
Tahun 2019

No.	Deputi	Pagu Kegiatan		Total Pagu (Rp)
		IKU (Rp)	IK (Rp)	
1	Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman	973.562.000	-	973.562.000
2	Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan	47.346.724.000	-	47.346.724.000
3	Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan	756.729.000	184.355.000	941.084.000
4	Deputi Bidang Administrasi			
	a. Biro Protokol	143.217.899.000	3.168.926.000	146.386.825.000
	b. Biro Perencanaan dan Keuangan	-	23.380.282.000	23.380.282.000
	c. Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian	-	2.073.694.000	2.073.694.000
	d. Biro Umum	-	44.267.583.000	44.267.583.000
5	Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)	-	1.002.861.000	1.002.861.000
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN		192.294.914.000	74.077.701.000	266.372.615.000

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Sekretariat Wakil Presiden yang dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung IKU sebesar Rp 192.294.914.000,00 atau sebesar 72,20% dari total pagu Sekretariat Wakil Presiden. Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKU pada tahun 2019 mencapai Rp 154.044.056.874,00 atau terserap sebesar 80,12% dari total pagu anggaran kegiatan yang mendukung IKU sebesar Rp 192.294.914.000,00. Adapun realisasi pagu anggaran kegiatan yang mendukung IKU Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019 tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel 3.18.

Tabel 3.18

**Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan IKU
Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019**

No.	Deputi	Kegiatan IKU		%
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman	973.562.000	937.326.149	96,30
2	Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan	47.346.724.000	43.476.411.148	91,83
3	Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan	756.729.000	748.024.458	98,85
4	Deputi Bidang Administrasi			
	1. Biro Protokol	143.217.899.000	108.882.295.119	76,03
	2. Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	-
	3. Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian	-	-	-
	4. Biro Umum	-	-	-
5	Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)	-	-	-
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN		192.294.914.000	154.044.056.874	80,12

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, realisasi anggaran Sekretariat Wakil Presiden dilihat dari capaian pada masing-masing program, baik program yang memuat kegiatan-kegiatan IKU maupun IK secara keseluruhan mencapai Rp 225.795.962.527,00 atau sebesar 84,77% dari pagu total sebesar Rp 266.372.615.000,00.

**Tabel 3.19
Realisasi Anggaran per Program Tahun 2019**

No.	%	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Sekretariat Negara	217.111.245.000	180.451.800.017	83,11%	IKU+IK
2	Penyelenggaraan pelayanan dukungan kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden	49.261.370.000	45.344.162.510	92,05%	IKU + IK
Total		266.372.615.000	225.795.962.527	84,77%	

Pada Tahun Anggaran 2019, Sekretariat Wakil Presiden memperoleh pagu definitif sebesar Rp107.228.405.000,00. Pada periode triwulan I TA 2019, Sekretariat Wakil Presiden mengajukan permohonan revisi penambahan informasi kinerja serta penambahan anggaran berkaitan dengan dana Hibah Luar Negeri terkait Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) kepada Kementerian Keuangan. Revisi penambahan anggaran tersebut disetujui oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 2 April 2019 melalui persetujuan revisi DIPA Sekretariat Wakil Presiden. Dengan demikian, DIPA Sekretariat Wakil Presiden mengalami penambahan sebesar Rp61.248.190.000,00 sehingga total pagu menjadi Rp168.476.595.000,00.

Dalam pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan VVIP Wakil Presiden beserta rombongan, anggaran yang dimiliki tidak mencukupi untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap Wakil Presiden beserta rombongan. Oleh sebab itu, Sekretariat Wakil Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk ditambahkan ke dalam Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara (BA 007, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara (007.04.01). Usulan tersebut mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan yang ditandai dengan dikeluarkannya surat dari Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1126/AG/2019 tanggal 3 Juli 2019 hal Penyampaian SP SABA 999.08 Dalam Rangka Pergeseran Anggaran BA BUN (BA 999.08) ke BA Kementerian Sekretariat Negara (BA 007) untuk Mendukung Kegiatan VVIP Kepresidenan dan Kenegaraan yang Memiliki Prioritas Tinggi. Revisi penambahan anggaran tersebut telah disetujui pada tanggal 12 Juli 2019 sehingga anggaran Sekretariat Wakil Presiden bertambah sebesar Rp88.696.849.000,00. Dengan demikian, alokasi anggaran Sekretariat Wakil Presiden setelah penambahan usulan dimaksud menjadi Rp257.173.444.000,00.

Wakil Presiden memiliki beberapa arahan strategis yang dukungannya perlu diberikan agar kegiatan Wakil Presiden dapat berjalan dengan optimal. Salah satu arahan strategis Wakil Presiden yang menjadi perhatian adalah mengenai upaya Indonesia dalam proses perdamaian di Afghanistan. Untuk mendukung tercapainya hal dimaksud, Sekretariat Wakil Presiden mengajukan usulan tambahan anggaran terkait *Peace Building Process* Afghanistan. Usulan tersebut mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan yang kemudian menerbitkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1878/AG/2019 tanggal 1 Oktober 2019 hal Penyampaian SP SABA 999.08 Dalam Rangka Pergeseran Anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Sekretariat Negara (BA 007) TA 2019. Revisi penambahan anggaran tersebut telah disetujui pada tanggal 23 Oktober 2019 sehingga anggaran Sekretariat Wakil Presiden bertambah sebesar Rp23.767.425.000,00. Oleh karena itu, alokasi anggaran Sekretariat Wakil Presiden setelah penambahan usulan dimaksud menjadi Rp280.940.869.000,00.

Pada triwulan IV TA 2019, Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) mengajukan pengurangan anggaran yang berasal dari Hibah Luar Negeri. Pengajuan revisi anggaran tersebut disetujui pada tanggal 18 Desember 2019 sehingga anggaran Sekretariat Wakil Presiden berkurang sebesar Rp14.568.254.000,00 dan total akhir pagu adalah sebesar Rp266.372.615.000,00.

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Keuangan

Realisasi anggaran Sekretariat Wakil Presiden Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 225.795.962.527,00 atau 84,77% dari pagu anggaran sebesar Rp 266.372.615.000,00 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan efisiensi anggaran layanan perkantoran dengan membatasi penggunaan listrik, pembatasan penggunaan kertas, dan optimalisasi mesin fotokopi untuk mencetak dokumen (pengurangan alokasi anggaran toner);
- b. Pembatasan biaya lembur, *snack* rapat, makan siang, dan belanja barang operasional lainnya.

2. Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain:

- a. Kebijakan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor, yaitu pembatasan menggunakan air, listrik, telepon, dan internet secara efisien, menghemat kertas; tidak menggunakan plastik sekali pakai; pengendalian penggunaan perlengkapan kerja/alat tulis kantor; penggunaan bahan bakar minyak kendaraan sesuai dengan kebutuhan (menggunakan kartu kendali);
- b. Bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, seperti bekerja sama dengan PT Palyja untuk pemeriksaan dan penggantian pipa air bersih; dan bekerja sama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (LKBN Antara) dalam penayangan berita secara *real time* di *media sharing*;
- c. penerapan aplikasi perkantoran single.setwapres.go.id untuk *sharing files* sehingga meminimalisir penggunaan kertas dokumen cetak (*paperless*); dan
- d. Digitalisasi dokumen perkantoran melalui aplikasi SPDE sehingga mengurangi pemakaian kertas (*paperless*).

3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peta Jabatan Sekretariat Wakil Presiden per Desember 2019, hanya 309 formasi jabatan struktural dan fungsional yang terisi dari 657 formasi yang ada (47,03%). Namun demikian, melalui komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh SDM, Sekretariat Wakil Presiden dapat memperoleh capaian kinerja 100% dengan dukungan total jumlah sumber daya manusia sebanyak 367 orang, terdiri dari aparatur sipil negara, perbantuan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), staf khusus Wakil Presiden, serta staf pada staf khusus.

3.6 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018 telah dimanfaatkan antara lain dengan melaksanakan dan merencanakan kegiatan pada tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja
 - Menyusun Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat pejabat fungsional dan pelaksana
 - Melakukan reviu dokumen atas Perjanjian Kinerja mulai dari tingkat pejabat struktural sampai dengan pelaksana;
 - Menetapkan pengalokasian sumber daya pada Rencana Aksi Tahun 2019 dengan memanfaatkan laporan kinerja Tahun 2018 untuk memperbaiki efisiensi kerja.
- b. Peningkatan Kinerja
 - Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang menitikberatkan pada sistem prestasi kerja, penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden dilakukan melalui Portal Informasi Kinerja Pegawai (PIAWAI). Sistem aplikasi PIAWAI memuat kinerja pegawai melalui pengisian aktivitas kerja sehari-hari pegawai, monitoring capaian SKP setiap bulan, penilaian SKP, serta penilaian perilaku kerja.
 - Asistensi penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja yang ditetapkan kepada seluruh unit kerja eselon I dan eselon II di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.

3.7 Capaian Kinerja Lainnya

Pada tahun 2019, Sekretariat Wakil Presiden memperoleh nilai **89,98** dengan kriteria “**A**” atau predikat **MEMUASKAN** atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2019 yang dilakukan oleh Tim Evaluator dari Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara.

3.8 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Tahun Sebelumnya

Sekretariat Wakil Presiden telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Wakil Presiden tahun 2018 oleh Tim Evaluator dari Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputy Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara dan akan menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai acuan perbaikan kinerja tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.20
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019

Rekomendasi	Kegiatan
Tahun 2019	
<p>(1) Memonitoring Rencana Aksi dan mememanfaatkannya sebagai acuan untuk mengevaluasi kegiatan (analisis kendala dan solusi)</p> <p>(2) Melaksanakan pemantauan kemajuan pencapaian kinerja melalui rapat pembahasan kinerja secara bulanan</p> <p>(3) Pelaporan kinerja pada Eselon I dan Eselon II agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak hanya menginformasikan rekapitulasi kegiatan/sub kegiatan, namun analisis terhadap pencapaian sasaran serta indikator kinerja - Menginformasikan pagu dan realisasi per IKU/sasaran - Menginformasikan realisasi sampai dengan tahun berjalan vs target jangka menengah, dan - Menginformasikan penjelasan terkait tindak lanjut penyelesaian kendala tahun sebelumnya. 	<p>(1) Monitoring rencana aksi dilakukan setiap berkala sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya media komunikasi grup para PIC untuk memudahkan pelaksanaan monitoring - Reviu atas dan identifikasi kendala dan solusi pada rencana aksi dilakukan secara bulanan <p>(2) Adanya pertemuan berkala (bulanan dan mingguan) antara pimpinan dan staf dibawahnya secara berjenjang, mulai dari unit kerja eselon I sampai dengan unit kerja eselon II untuk membahas capaian kinerja dan kendala yang dihadapi, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat pimpinan tingkat Eselon I dipimpin oleh Kepala Sekretariat Wakil Presien dilakukan setiap bulan - Rapat pembahaan dimasing-masing unit kerja Eselon II dilakukan setiap minggu <p>(3) Format laporan kinerja telah diperbaiki sesuai rekomendasi yang diberikan, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memuat analisis atas pencapaian sasaran serta indikator kinerja - Memuat pagu dan realisasi per IKU/sasaran - Memuat realisasi dengan tahun berjalan vs target jangka menengah, dan - Memuat penjelasan terkait tindak lanjut penyelesaian kendala tahun sebelumnya

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Laporan Kinerja Tahun 2019 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Wakil Presiden di tahun terakhir dalam mencapai visi yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Laporan Kinerja ini menunjukkan keberhasilan dan/atau kegagalan capaian strategis sepanjang tahun 2018 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja lainnya dengan analisis kinerja berdasarkan sasaran strategis.

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan yang ditargetkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Sasaran Strategis (1): Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung tugas Wakil Presiden, didukung oleh IKU1 dengan capaian kinerja IKU sebesar 100% (369 laporan analisis). Pencapaian sasaran strategis ini merupakan tanggung jawab dari seluruh kedeputian substansi (Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman; Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan; serta Pemerintahan).

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2: Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden, didukung oleh IKU2, IKU3, IK4, IK5, IK6, dan IK7. Capaian kinerja IKU2 adalah nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden sebesar 5,20, mutu pelayanan A, dan kinerja pelayanan Sangat Baik. Capaian kinerja IKU3 adalah nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden sebesar 5,33, mutu pelayanan A, dan kinerja pelayanan Sangat Baik. Capaian kinerja IK4 sebesar 100% atau ada 3.431 kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan. Capaian kinerja IK5 sebesar 100% atau ada 44.189 kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan. Capaian kinerja IK6 adalah tersusunnya dua dokumen (100%) laporan program, anggaran, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden. Selanjutnya, capaian kinerja IK7 adalah tersusunnya satu dokumen laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden (100%). Kinerja pada IKU2, IKU3, IK5, IK6, dan IK7 merupakan kontribusi dari pelaksanaan tugas Deputi Bidang Administrasi, sedangkan IK4 merupakan kontribusi dari pelaksanaan tugas Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan.

Adanya dukungan kinerja dari seluruh ke deputian di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, baik ke deputian substansi maupun administrasi, capaian kinerja pada sasaran strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019 mencapai 100%.

Pada sisi anggaran, tahun 2019 dengan keseluruhan pagu anggaran sebesar Rp 266.372.615.000,00 mencapai realisasi Rp 225.795.962.527,00 atau sebesar 88,77%. Sementara untuk pagu anggaran kinerja IKU tahun 2019 yang ditargetkan sebesar Rp 192.294.914.000,00 terealisasi sebesar Rp 154.044.056.874,00 atau 80,12%.

4.2. Upaya Ke Depan

Sekretariat Wakil Presiden kedepan perlu terus melakukan upaya-upaya perbaikan dan fokus pada peningkatan kualitas analisis kebijakan maupun kualitas pelayanan kepada Wakil Presiden. Hal ini diperlukan untuk mencapai target kinerja dengan jumlah sumber daya yang terbatas. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- Melakukan penataan Sumber Daya Manusia pada unit kerja yang memiliki beban kerja tinggi;
- Mendorong peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dengan memperbanyak pelatihan *in house training* yang lebih bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan prioritas;
- Membuat mekanisme pengaturan pola kerja terintegrasi lintas ke deputian di Sekretariat Wakil Presiden;
- Melakukan evaluasi sistem dan prosedur kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi;
- Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyusunan analisis kebijakan dan pencapaian kinerja lainnya; dan
- Memelihara dan meningkatkan jejaring kerja dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan pengelolaan sumber sepanjang tahun 2018, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Sekretariat Wakil Presiden yang lebih baik di masa mendatang.



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Oemar
Jabatan : Kepala Sekretariat Wakil Presiden

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pratikno

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

Mohamad Oemar

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas Wakil Presiden	1 Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%
2	Terjaminya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada wakil presiden	2 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	4,44
		3 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	4,44
		4 Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%
		5 Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%
		6 Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden	1 laporan
		7 Jumlah laporan program, anggaran dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun	2 dokumen

Kegiatan:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara
2. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden

Anggaran:

Rp.104.646.971.000,00

Rp.2.581.434.000,00

Jakarta, Januari 2019

Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

Kepala Sekretariat Wakil Presiden,



Mohamad Oemar